

Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Perikanan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan

Danil Hardinata¹, Romi Mesra²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

²Program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹danilhardinata@gmail.com, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2024

Revised May 17, 2024

Accepted May 30, 2024

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengembangan Ekonomi, Peranan, Sektor Perikanan



Abstrak

Desa Mantang Besar adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Desa Mantang Besar mempunyai peluang besar dalam sektor perikanan. Hal tersebut dapat ditinjau dari berbagai sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berperan aktif dalam pengembangan sektor perikanan, beberapa peran tersebut antara lain melalui pembangunan fasilitas tambatan kapal nelayan, pemberian bantuan bibit ikan kerapu cantang, dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Melalui kebijakan dan program-program ini, pemerintah desa berhasil memfasilitasi kegiatan perikanan masyarakat setempat, meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan, serta memberikan perlindungan dan jaminan sosial nelayan sehingga memberikan manfaat positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Mantang Besar secara keseluruhan

Abstract

Mantang Besar Village is located in Mantang Sub-district, Bintan Regency, Riau Islands Province. Mantang Besar Village has great opportunities in the fisheries sector. This can be seen from a variety of abundant natural resources and the number of people who work as fishermen. This study aims to analyze the role of the village government in the economic development of communities in the fisheries sector in Mantang Besar Village, Mantang District, Bintan Regency. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection methods, namely interviews, observations, and documentation studies. The results show that the village government has played an active role in the development of the fisheries sector, some of these roles include through the construction of fishing boat mooring facilities, providing assistance with grouper seeds, and implementing the BPJS Employment program for fishermen. Through these policies and programs, the village government has succeeded in facilitating the fisheries activities of the local community, increasing fisheries productivity in a sustainable manner, and providing protection and social security for fishermen so as to provide positive benefits to the overall economic improvement of the Mantang Besar Village community.

Keywords: Village Government, Economic Development, Role, Fisheries Sector

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu negara. (Mesra & Dolonseda, 2023). Salah satu sektor pendukung dalam pengembangan ekonomi adalah sektor perikanan. Sektor perikanan adalah bagian dari sektor ekonomi yang memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan secara nasional serta memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian secara nasional. Sektor perikanan juga berperan penting dalam penyediaan protein hewani, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan ekonomi khususnya pengembangan ekonomi pada daerah – daerah pesisir dan pulau – pulau kecil. (Sari & KhoirudSin, 2023)

Karena memiliki peranan penting serta kontribusi yang besar maka sektor perikanan adalah salah satu sektor yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Desa Mantang Besar Kec. Mantang Kab. Bintan merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi bidang perikanan yang cukup besar. Pengembangan ekonomi masyarakat di sektor perikanan di desa ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Terkait pengembangan ekonomi masyarakat tersebut, maka pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan. Melalui berbagai program dan kebijakan yang diambil, pemerintah desa dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat nelayan, serta mendorong tumbuhnya industri-industri pendukung sektor perikanan di desa tersebut. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan untuk memantau pengelolaan sumber daya perikanan di wilayahnya, serta memfasilitasi pengembangan usaha perikanan masyarakat. Dengan peran yang tepat, pemerintah desa dapat membuat suasana yang mendukung bagi pertumbuhan sektor perikanan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan. (Panda, 2023)

Pada Penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Rancapanggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat" mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya efektivitas peran Kades dalam memonitor perkembangan masyarakat, yang menyebabkan minimnya keterlibatan mereka pada perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi di Desa Rancapanggung. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan mengkaji kontribusi Pemerintah Desa dalam meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi Desa. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi Desa masih belum optimal. Ditemukan adanya kelemahan, antara lain minimnya pengawasan oleh Kades terhadap perkembangan masyarakat, minimnya keterlibatan masyarakat pada proses pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi, kurangnya upaya sosialisasi, serta kurangnya rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. (P. Nopiansyah, Agustina Setiawan, 2019)

Pada Penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam di bidang Perikanan Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuma Kec. Essang Kab. Kepulauan Talaud”. Permasalahan yang diidentifikasi adalah bahwa masyarakat Desa Kuma masih terbatas pada cara tradisional dalam memanfaatkan potensi laut dan belum memperhatikan potensi lain yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah desa untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kontribusi pemerintah desa Kuma dalam mengelola sumber daya alam di sektor kelautan, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan seperti masyarakat (nelayan), Kades, Staf desa, tokoh masyarakat, akademisi, dan BPD. Hasil penelitian yaitu Peran stabilisasi dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal/budaya untuk pengelolaan sumber daya laut dan Pemanfaatan sumber daya laut belum maksimal karena terbatasnya teknologi dan fasilitas. (Ongki Andika Lala, Johannis Kawan, 2020)

Pada Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kab. Karawang”. Permasalahan yang disorot pada penelitian ini yaitu masih banyaknya nelayan yang berada pada kondisi dekat dengan garis kemiskinan, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan ekonomi mereka dengan intervensi pemerintah. Tujuan dari penelitian adalah untuk menginvestigasi peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator untuk memberdayakan nelayan di Desa Ciparagejaya Kab. Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap para nelayan telah cukup baik, ditandai dengan terbentuknya program pembinaan, pelatihan, asuransi, dan penyediaan fasilitas sarana prasarana bagi nelayan di Desa Ciparagejaya. Namun belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur pemberdayaan nelayan. (Ramdayanti et al., 2021)

Pada Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)”. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bahwa potensi sumber daya alam berupa mata air panas alami di Desa Way Urang Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi peran Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber air panas di Desa Way Urang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa Way Urang dan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber air panas sebagai potensi yang ada pada desa tersebut. (Amantha, 2021)

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pada penelitian ini peneliti membahas penelitian berfokus pada peranan pemerintah desa untuk mengembangkan ekonomi masyakat pada sektor perikanan, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada peranan pemerintah desa untuk mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi pada desa secara umum atau dari tinjauan banyak sektor bukan hanya pada sektor perikanan saja.

Desa Mantang Besar adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kec. Mantang Kab. Bintan Prov. Kepri. Desa Mantang Besar ini mempunyai peluang besar pada sektor perikanan. Sebagian besar penduduk desa ini mengandalkan mata pencaharian mereka pada bidang perikanan. Sektor perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat desa dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa tersebut. (BPS Kabupaten Bintan, 2023)

Namun, sektor perikanan di Desa Mantang Besar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, teknologi yang terbatas, minimnya infrastruktur pendukung, dan kurangnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha perikanan secara berkelanjutan. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, serta berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan. Peran Pemerintah Desa Mantang Besar sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa tersebut melalui program – program yang telah dicanangkan baik melalui anggaran Dana Desa maupun anggaran lainnya. Dari Penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan rencana kebijakan dan tahapan program pembangunan yang lebih efektif guna mengembangkan sektor perikanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mantang Besar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Peranan Pemerintah Desa

Peranan adalah kumpulan perilaku yang dianggap seharusnya dimiliki oleh individu yang berada dalam suatu masyarakat. Peranan mencakup aturan-aturan yang terkait peran individu dalam masyarakat. Pengertian lain Peranan sebagai konsep, apa yang akan dilakukan oleh individu pada konteks organisasi Masyarakat. (Abdulatif & Dewi, 2021)

Pemerintah adalah Badan melakukan dan memegang kekuasaan memerintah. (Umar, 2017). Desa merupakan suatu wilayah otonom yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan hukum untuk mengelola dan mengurus berbagai kepentingan warganya secara mandiri serta diakui pada sistem pemerintahan nasional sebagai bagian dari kabupaten (Mesra et al., 2023)

Pemerintahan desa merupakan bagian atau bagian kecil dari kegiatan pemerintahan. (NASRIN et al., 2023). Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan masalah pemerintahan serta urusan masyarakat setempat. Pelaksanaan urusan pemerintahan pada desa berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keteraturan administrasi, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keragaman, dan partisipatif (Yustisia, 2015). Pada struktur pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahan dijalankan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Simbolon et al., 2021)

Jadi peranan pemerintah desa merupakan seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh Kepala Desa serta perangkat desa untuk menjalankan sistem pemerintahan desa guna peningkatan ekonomi masyarakat desa. Peran pemerintah desa dalam mengelola pembangunan di wilayahnya hal tersebut sejalan dengan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur kewenangan pada pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi dan

melakukan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Pemerintah Indonesia, 2014)

2. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan adalah tindakan untuk meningkatkan keahlian melalui proses kegiatan, pembelajaran serta pelatihan.(Ritonga et al., 2022). Ekonomi merupakan rangkaian luas dari kegiatan produksi serta konsumsi yang saling berhubungan, dan berperan untuk menentukan cara pengalokasian pada sumber daya terbatas.(Dwi, 2023)

Pengembangan ekonomi adalah serangkaian upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan keadaan ekonomi suatu wilayah atau negara. Pengembangan ekonomi melibatkan berbagai aspek, seperti peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi.

Pengembangan ekonomi berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yaitu kegiatan yang berfokus pada upaya tolong menolong dalam kelompok, mengidentifikasi kebutuhan, dan melaksanakan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka.(Dr. Zubaedi, M.Ag., 2016)

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok orang yang tinggal bersama dalam area geografis yang sama dan saling berinteraksi serta terikat oleh norma, nilai, dan budaya yang sama. Masyarakat dapat berupa kelompok besar atau kecil yang membentuk suatu sistem sosial yang terorganisir, di mana setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab tertentu.(Prasetyo & Irwansyah, 2020)

4. Sektor Perikanan

Perikanan merupakan aktivitas manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya hayati di perairan.(Putri, 2022)

Sektor perikanan adalah bidang ekonomi yang mencakup beberapa kegiatan seperti penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusi ikan serta hasil laut lainnya. Sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian banyak negara, terutama negara kepulauan dan pesisir, karena menyediakan sumber makanan, lapangan kerja, dan pendapatan bagi masyarakat.

5. Teori Tindakan Sosial dan Teori Pembangunan Berkelanjutan

Max Weber, seorang sosiolog, mengemukakan Teori Tindakan Sosial. Pokok pikiran dari teori ini adalah tindakan yang dilakukan individu mempunyai signifikansi yang bersifat subjektif untuk pelakunya dan ditujukan kepada tindakan orang lain. Max Weber berpendapat bahwa tindakan sosial manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Teori ini membantu memahami motivasi di balik tindakan individu dalam konteks sosial. Menurut pandangan Weber, dunia terbentuk melalui tindakan sosial yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Sumintak & Sumirat, 2022)

Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) adalah sebuah kerangka teoritis yang berfokus pada perlunya kesetaraan antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan proses pembangunan. Jadi Inti dari Teori Pembangunan Berkelanjutan adalah mengintegrasikan tiga pilar utama ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam usaha kegiatan pembangunan bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kapasitas generasi penerus.(Hidayati & Saptatia Drahati Nugrahani, 2021)

C. Metode

Metode penelitian yang terapkan yaitu metode penelitian Deskriptif kualitatif untuk menjelaskan kondisi lingkungan dan Masyarakat yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi perspektif subjek penelitian secara mendalam. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan dari informasi maupun data yang didapatkan dilapangan.

D. Hasil dan Pembahasan

Peranan Pemerintah Desa dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Perikanan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, berikut adalah beberapa peranan pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa Mantang Besar, sebagai berikut;

1. Pembangunan Fasilitas Tambatan Kapal Nelayan

Seperti yang diungkapkan oleh RN (48 Tahun) sebagai berikut; *“Kami warge Selat Limau, sangat besukur dan berterimekasih kepada pemerintah ade bantuan pelantar tambatan bot pompong jadi sangat membantu kami warge Selat Limau ni”*(wawancara tanggal 10 Mei 2024).

(kami warga masyarakat Kampung Selat Limau sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah karena telah membantu membangun Pelantar untuk tambatan pompong kami)

Seperti yang diungkapkan oleh RN bahwa Pelantar Nelayan sebagai tambatan Pompong nelayan sangat dibutuhkan warga sebagai fasilitas bagi para nelayan untuk menambatkan pompong mereka agar aman dari ombak dan gelombang tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh AB (40 Tahun) sebagai berikut; *“Dengan adanya pelantar ne sangat membantu kami nelayan sini. Sebelumnya, kami susah nak tarok boat kami biar aman. Nah saat ini dengan adanya pembangunan pelantar ne, kami jadi mudah nak tarok boat kami, nak persiapan ato nak perbaiki boat kami sebelum kami kelaut”* (wawancara tanggal 10 Mei 2024).

(Keberadaan pelantar ini sangat membantu aktivitas kami sebagai nelayan. Sebelumnya, kami kesulitan untuk memarkirkan dan menambatkan pompong kami dengan aman. Kini, dengan adanya pelantar yang telah dibangun, kami dapat dengan mudah dan aman memarkirkan perahu kami. Hal ini memudahkan kami untuk melakukan persiapan dan perbaikan perahu sebelum kami melaut)

Seperti yang diungkapkan oleh AB bahwa Sebelum adanya pelantar, para nelayan mengalami kesulitan dalam memarkirkan dan menambatkan perahu/pompong mereka dengan aman. Biasanya, mereka harus menarik perahu ke tepi pantai atau mencari tempat seadanya untuk menambatkannya. Hal ini berisiko merusak perahu dan menghambat aktivitas persiapan sebelum melaut. Namun, dengan adanya pelantar nelayan yang telah dibangun, situasi ini menjadi jauh lebih mudah dan aman bagi para nelayan. Mereka kini dapat dengan mudah memarkirkan perahu-perahu mereka di tempat yang telah disediakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pemerintah melalui Pemerintah Desa Khususnya Desa Mantang Besar telah mengalokasikan Program Pembangunan berupa fasilitas tambatan kapal nelayan sebagai upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Mantang Besar. Dari program tersebut memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat Desa Mantang Besar khususnya masyarakat yang berdomisili di Pulau Selat Limau.

Dari pelaksanaan program tersebut pemerintah desa telah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam mengembangkan sektor perikanan di Desa Mantang Besar. Kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dengan teori pembangunan ekonomi desa yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, pengembangan infrastruktur, akses modal, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pemerintah Desa Mantang Besar memiliki peranan penting dalam mendukung sektor perikanan di wilayahnya. Mengacu pada Teori Tindakan Sosial, pemerintah desa mantang besar telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Salah satu contohnya adalah menyediakan fasilitas tambatan kapal nelayan untuk memudahkan aktivitas penangkapan ikan.

Gambar 1. Pembangunan Fasilitas Tambatan Kapal Nelayan di Pulau Selat Limau



Sumber : (Dokumentasi Peneliti)

2. Pemberian Bantuan Bibit Ikan Kerapu Cantang

Seperti yang diungkapkan oleh DM (42 Tahun) sebagai berikut; *“Dengan adanya bantuan bibit ikan kerapu ne, kami merasa sangat terbantu dan sangat bermanfaat bagi warga kami warge desa ”*(wawancara tanggal 10 Mei 2024).

(Dengan adanya bantuan bibit ikan kerapu ini, kami merasa sangat terbantu dan sangat bermanfaat bagi kami warga desa mantang besar)

Seperti yang diungkapkan oleh DM bahwa dengan adanya bantuan berupa bibit Ikan Kerapu Cantang tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha perikanan dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pihak Pemerintah Desa Mantang Besar Telah berperan aktif dalam membantu masyarakat di sektor perikanan berupa pemberian bantuan Bibit Ikan Kerapu Cantang sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Mantang Besar

Terkait hal tersebut juga berarti pemerintah desa juga telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan (Brundtland Report). Hal ini terlihat dari program yang telah dilaksanakan, seperti pemberian bantuan bibit ikan kerapu cantang untuk meningkatkan produktivitas perikanan secara berkelanjutan, serta mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan.

Gambar 2. Pemberian Bantuan Bibit Ikan Kerapu Cantang



Sumber : (Dokumentasi Peneliti)

3. Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan

Seperti yang diungkapkan oleh AM (41 Tahun) sebagai berikut; *“Program BPJS ne, banyak manfaat bagi kami, membantu kami untuk berobat dan jaminan hari tue kami”*(wawancara tanggal 10 Mei 2024).

(Program BPJS ini, memiliki banyak manfaat bagi kami, membantu kami untuk berobat dan sebagai jaminan hari tua kami)

Seperti yang diungkapkan oleh AM bahwa BPJS Ketenagakerjaan yang di programkan oleh Pemerintah Desa Mantang Besar mempunyai banyak manfaat bagi para nelayan khususnya masyarakat Nelayan Desa Mantang Besar. Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi para nelayan Desa Mantang Besar dalam menjalankan profesi mereka yang berisiko tinggi

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Pihak Pemerintah Desa Mantang Besar Telah berperan aktif dalam membantu masyarakat yaitu dengan melaksanakan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan. Program tersebut memberikan perlindungan sosial kepada nelayan dengan adanya perlindungan tersebut, nelayan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Dengan program BPJS Tenaga Kerja bagi nelayan juga dapat membantu meningkatkan ekonomi nelayan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan atau kematian, bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban finansial yang dialami oleh nelayan dan keluarganya. Selain itu, jaminan hari tua juga dapat memberikan kepastian bagi nelayan ketika mereka memasuki masa pensiun.

Dengan adanya jaminan sosial ini, nelayan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat desa terutama pada desa Mantang Besar.

Gambar 3. Pelaksanaan Program BPJS Tenaga Kerja Bagi Nelayan



Sumber : (Dokumentasi Peneliti)

Pembahasan :

1. Pembangunan Fasilitas Tambatan Kapal Nelayan

Pembangunan fasilitas tambatan kapal nelayan oleh pemerintah desa merupakan bentuk tindakan sosial yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat nelayan. Kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan Teori Tindakan Sosial yang menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individual yang memiliki manfaat subjektif dan ditujukan kepada orang lain. Dalam konteks ini, pemerintah desa Mantang Besar telah melakukan tindakan pembangunan infrastruktur tersebut dengan tujuan untuk membantu dan mendukung nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Pembangunan fasilitas tambatan kapal juga merupakan bentuk upaya pemerintah desa Mantang Besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan yang berfokus pada keseimbangan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah desa mendukung kegiatan ekonomi nelayan

2. Pemberian Bantuan Bibit Ikan Kerapu Cantang

Pemberian bantuan bibit ikan kerapu cantang kepada nelayan merupakan upaya pemerintah desa Mantang Besar dalam memberdayakan masyarakat dan mendukung pengembangan usaha perikanan. Hal ini sejalan dengan peran pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pemberian bantuan bibit ikan juga dapat dilihat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan dalam budidaya ikan. Hal ini selaras dengan konsep pengembangan ekonomi yang melibatkan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar tercipta peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

3. Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan oleh pemerintah desa Mantang Besar merupakan bentuk perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat nelayan. Pemberian jaminan sosial kepada nelayan juga dapat dipandang sebagai upaya pemerintah desa Mantang Besar dalam mendukung terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama terkait dengan tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Dengan adanya jaminan sosial, nelayan dapat merasa lebih terlindungi dan aman dalam menjalankan aktivitas ekonominya, sehingga dapat terhindar dari risiko jatuh ke dalam kemiskinan.

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan juga sejalan dengan prinsip pemerintahan desa yang menekankan pada profesionalitas dan akuntabilitas. Pemerintah desa berupaya untuk memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat nelayan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko ekonomi.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat tarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Mantang Besar memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan di Desa Mantang Besar. Beberapa peran tersebut antara lain melalui pembangunan fasilitas tambatan kapal nelayan, pemberian bantuan bibit ikan kerapu cantang, dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Melalui kebijakan dan program-program ini, pemerintah desa berhasil memfasilitasi kegiatan perikanan masyarakat setempat, meningkatkan produktivitas perikanan secara

berkelanjutan, serta memberikan perlindungan sosial nelayan. Hal ini memberikan pengaruh positif pada kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat desa Mantang Besar secara keseluruhan.

2. Saran

Bagi Pemerintah Desa Mantang Besar yaitu Pemerintah Desa Mantang Besar perlu meningkatkan konsistensi dan keberlanjutan program-program pengembangan sektor perikanan guna memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, juga perlu mencari sumber-sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat/daerah maupun melalui kemitraan, untuk memperluas cakupan dan dampak program terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Bagi Masyarakat Desa Mantang Besar yaitu Agar masyarakat selalu aktif berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan dan pengembangan sektor perikanan yang diinisiasi oleh pemerintah desa supaya program yang dijalankan oleh pemerintah desa bisa dirasakan hasilnya secara rata. Selanjutnya bagi Penelitian Selanjutnya yaitu Pada penelitian selanjutnya agar mengkaji secara lebih mendalam tentang dampak jangka panjang dari program-program pemerintah desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

F. Daftar Pustaka

- Abdulatif, S., & Dewi, D. A. (2021). *Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa*. 04, hal.103.
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- BPS Kabupaten Bintan. (2023). Kecamatan Mantang Dalam Angka 2023. In 21020.2314 (1st ed., Vol. 1). CV. Berkah Mandiri.
- Dr. Zubaedi, M.Ag., M. P. (2016). *“Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik.”* Kencana.
https://books.google.co.id/books?id=vVvsmgEACAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Dwi, A. (2023). *Ruang Lingkup dan Motif Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU. <https://feb.umsu.ac.id/ruang-lingkup-dan-motif-ekonomi/>
- Hidayati, K., & Saptatia Draji Nugrahani, H. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Health Sains*, 2(1), 94–103. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i1.168>
- Mesra, R., & Dolonseda, H. P. (2023). Kolaborasi Perguruan Tinggi, UMKM, dan Masyarakat Dari Sudut Pandang Sosiologi Ekonomi. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 481–486. <https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5438>
- Mesra, R., Wereh, A. C., Kasenda, M. A., & Sidayang, S. (2023). Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4682/http>
- NASRIN, ISMAINAR, H., PUTRA, S., & SUHARTONO, R. M. (2023). Hukum Pemerintah Desa. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

- Ongki Andika Lala, Johannis Kawan, I. S. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Bidang Perikanan Laut Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuma Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2 No. 5(ISSN : 2337-5736), 1–12.
- P. Nopiansyah, Agustina Setiawan, D. K. (2019). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi Di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. *Caraka Prabhu*, 03(02), 184–206.
- Panda. (2023). *Program Perikanan Budidaya Desa: Meningkatkan Produksi, Memperkuat Ekonomi Lokal, dan Mempromosikan Produk Lokal di Pasar Global*. <https://www.panda.id/program-perikanan-budidaya-desa-meningkatkan-produksi-memperkuat-ekonomi-lokal-dan-mempromosikan-produk-lokal-di-pasar-global/>
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), hal. 163. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Putri, V. K. M. (2022). *Perikanan: Pengertian dan Hasil Utamanya*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/19/083000369/perikanan--pengertian-dan-hasil-utamanya?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Ritonga, A. P., Andini, N. P., & Ikmlah, L. (2022). Pengembangan Bahan Ajaran Media. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), hal. 344. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2612>
- Sari, C. D., & Khoirudin, R. (2023). Pengaruh Sektor Perikanan Terhadap PDB Indonesia. *Pjeb: Perwira Journal of Economy & Business*, 3(1), hal. 11. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v3i01>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), hal.299. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Sumintak, S., & Sumirat, I. R. (2022). Moderasi Beragama dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4085>
- Umar, N. (2017). Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. In *Sereal Untuk* (Vol. 51).
- Yustisia, tim visi. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* (L. Sutinah (ed.); Cetakan 1). visimedia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2oCwCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=buku+undang+tentang+desa&ots=inB7OKrfdM&sig=GhVAfa-pA8-4bT8ibDAaSEE8Ryw&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+undang+tentang+desa&f=false